



# **RENCANA KERJA**

## **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**Tahun Anggaran 2020**



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Kusuma Bhakti (Bukit Gulai Bancah) Tel / Fax. (0752) 33050  
=====

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BUKITTINGGI**  
**NOMOR : 189.800/30/I-BKPSDM/2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**  
**MANUSIA KOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2021;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf "a" dan "b" di atas perlu ditetapkan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Renja BKPSDM) dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor );
20. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi;

#### **MEMUTUSKAN :**

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : |  |
| Pertama    | : | Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2021 disusun dengan berpedoman Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021,      |
| Kedua      | : | Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, |
| Ketiga     | : | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya.  |

- Keempat : Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal : Agustus 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BUKITTINGGI



SISTINNA, SE  
NIP. 19660104 198602 2 003

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bpk. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi;
3. Sdr. Inspektur Kota Bukittinggi;
4. Arsip.

## DAFTAR ISI

<b>Surat Keputusan Daftar Isi</b>	<b>Hal.</b>
	<b>i</b>
	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud Dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	II-23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-25
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	II-33
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi	III-2
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	IV-1
4.1. Rencana Kerja	IV-1
4.2. Pendanaan	IV-5
<b>BAB V PENUTUP</b>	V-1





### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Petunjuk Pelaksanaannya yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

Rencana Pembangunan Daerah dimaksud adalah RPJPD, RPJMD dan RKPD adapun Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sendiri merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perangkat Daerah sendiri penyusunannya dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah serta Rancangan Awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang sudah



disusun mengingat terdapat perubahan terhadap beberapa rekening dan nomenklatur dari program/kegiatan yang selama ini dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Namun demikian penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2021 yang merupakan terjemahan perencanaan tahunan dibidang kepegawaian yang bersifat lebih operasional untuk kemudian dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian dalam rangka percepatan perwujudan aparatur sipil negara yang profesional dan sejahtera serta mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kota Bukittinggi dan Renstra BKPSDM yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2021 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah sebagai acuan dan menjaga konsistensi serta keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dalam melaksanakan program dan kegiatan serta pencapaian target dalam Rencana Strategis sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu Tahun 2021.
2. Sebagai bahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2021.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, memaparkan Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menjelaskan tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan serta Pendanaan.
- BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun 2021.

LAMPIRAN



## **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh sebab itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019.

Evaluasi yang dilakukan meliputi : 1). Pelaksanaan program dan kegiatan, dan 2). Hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk melakukan evaluasi tersebut diperlukan data dan informasi yang akurat yang berasal dari realisasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya antara lain anggaran maupun target dan capaian target.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi pada tahun 2019 melaksanakan 7 program dan 40 kegiatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi melalui Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan dan Urusan Kepegawaian.

Fungsi Penunjang Pemerintahan terkait dengan tugas rutin atau operasional perangkat daerah yang dilaksanakan melalui program : Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sedangkan Urusan Kepegawaian merupakan urusan terkait kewenangan, tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai suatu organisasi perangkat daerah.

Untuk melihat capaian kinerja program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2-1.**

**Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2019**

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Target Output</b>	<b>Capaian Output</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Pelayanan Administrasi perkantoran</b>				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Bh Materai 6000, 100 Bh Materai 3000, 12 Bln Perangko/Pengiriman Surat, 6 Buku Cek	150 Bh Materai 6000, & 100 Bh Materai 3000, 12 Bln Perangko/Pengiriman Surat	99%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan Rekening Telephone	12 Bulan Rekening Telephone	100%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2	4 Unit Roda 4, 7 Unit Roda 2	84,62%	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	20 Item Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	20 Item	100%	
Penyediaan alat tulis kantor	52 Item ATK yang disediakan	52 Item ATK yang disediakan	100%	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6 Item, 12 Bulan	6 Item, 12 Bulan	100%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	
Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan Makanan & Minuman	12 Bulan Makanan & Minuman	100%	
Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	12 Bulan Rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi, perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan sejenisnya yang dilaksanakan	12 Bulan Rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi, perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi, Bimtek, Diklat dan sejenisnya yang dilaksanakan	100%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	7 Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	7 Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	100%	

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Target Output</b>	<b>Capaian Output</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Keterangan</b>
Penyediaan jasa pegawai non PNS	3 Orang x 12 Bln, 12 Bln Premi asuransi	3 Orang x 12 Bln, 12 Bln Premi asuransi	100%	
Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	100%	
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
Pengadaan Peralatan Kantor	5 Unit Mouse Optick, 5 Unit Keyboard yang disediakan	5 Unit Mouse Optick, 5 Unit Keyboard yang disediakan	100%	
Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 Paket Vertical Blind	1 Paket Vertical Blind	100%	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit Gedung Kantor yang dipelihara	100%	
<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur</b>				
Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS	74 Orang	73 Orang	98,65%	
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	75 Orang	98 Orang	130,67%	
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>				
Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	15 Orang	54 Orang	360%	
Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	4 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 1 Rekomendasi Pangkat Pilihan	13 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 2 Rekomendasi Pangkat Pilihan	300%	
Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	3 Paket Rekomendasi PNS yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Tinggi Pratama	4 Paket Rekomendasi PNS yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Tinggi Pratama	133,33%	
Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara	100 Orang	138 Orang	138%	
Penyusunan Formasi PNS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Target Output</b>	<b>Capaian Output</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Keterangan</b>
Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
Fasilitasi Pindah/Masuk ASN	50 Orang	50 Orang	100%	
Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	7 Laporan	4 Laporan	57,14%	
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	12 Paket Rekomendasi	15 Paket Rekomendasi	125%	
Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	1 Laporan	1 Laporan	100%	
Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	2 Laporan	2 Laporan (2623 Orang)	100%	
<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>				
Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III	5 Org Pim Tk.III	5 Org Pim Tk.III	100%	
Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	200 Orang	219 Orang	109,5%	
Kegiatan Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV	20 Orang	20 Orang	100%	
<b>Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>				
Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	500 SK Kenaikan Pangkat, 5 SK Penyesuaian Masa Kerja, 20 SK Pemakaian Gelar	420 SK Kenaikan Pangkat, 124 SK Penyesuaian Masa Kerja	82,29%	
Fasilitasi Pengurusan KPE, KARIS/ KARSU dan KARPEG	100 Bh KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG yang diproses pengurusannya	47 Bh KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG yang diproses pengurusannya	47%	
Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG	1 Aplikasi (Data Base Kepegawaian yg Up Date)	1 Aplikasi (Data Base Kepegawaian yg Up Date)	100%	
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	12 Bulan Pengolahan Data Kepegawaian Pemko Bukittinggi secara On-line ke Pusat	12 Bulan Pengolahan Data Kepegawaian Pemko Bukittinggi secara On-line ke Pusat	100%	
Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	130 Orang yang Menerima SK	115 Orang yang Menerima SK	88,46%	
Pengelolaan Absensi Terintegrasi	1 Laporan	1 Laporan	100%	

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Target Output</b>	<b>Capaian Output</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur</b>				
Pengurusan Satya Lencana Karya Satya	300 Piagam yang di Proses Pemeriksaan Administrasi dan Pengurusan Berkas Penghargaan SLKS	323 Berkas yang di Proses Pemeriksaan Administrasi dan Pengurusan Berkas Penghargaan SLKS	107,67%	
Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan bagi Tenaga Non PNS	757 Orang yang menerima Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Honorer/PHL	757 Orang yang menerima Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Honorer/PHL	100%	
Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	55 Orang yang melaksanakan Pembekalan Purna Tugas	58 Orang yang melaksanakan Pembekalan Purna Tugas	93,72%	

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BKPSDM Tahun 2019*

Realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun 2019 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 2-2.**

**Realisasi Anggaran**

**Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kota Bukittinggi Tahun 2019**

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	561.217.250	492.802.673	87,81
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	122.900.000	117.424.880	95,55
3	Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	1.071.704.000	1.050.247.400	98,00
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	986.799.200	637.212.149	64,57
5	Program Pendidikan Kedinasan	958.694.700	905.356.914	94,44



<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
6	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	753.297.050	632.688.561	83,99
7	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	1.373.915.245	1.320.873.444	96,14
	<b>Jumlah</b>	<b>5.828.527.445</b>	<b>5.156.606.021</b>	<b>88,47</b>

*Sumber: Laporan Keuangan BKPSDM Tahun 2019*

Berdasarkan tabel 2.1 dan 2.2 dapat dilihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun 2019 terkait urusan fungsi penunjang pemerintahan dan urusan kepegawaian telah dapat direalisasikan sebesar Rp.5.156.606.021,- atau 88,47%.

Rendahnya serapan anggaran pada tahun 2019 ini antara lain disebabkan : perubahan rencana pengiriman peserta Bimtek bagi Lurah semula 20 orang namun ternyata hanya diikuti oleh 5 orang, Perubahan pola pelaksanaan dalam proses pengadaan CPNS tahun 2019 sehingga beberapa belanja yang telah direncanakan dan anggarkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS tidak dapat direalisasikan, Kebijakan Pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan, hal-hal tidak terduga dan efisiensi anggaran.

Untuk melihat evaluasi atas hasil pelaksanaan renja dan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2-3.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan  
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019  
Kota Bukittinggi**

**Nama Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2021		CATATAN
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun 2019	Ting kat Real isasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Ting kat Capai an Real isasi Targ et Rens tra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12
<b>3.02.</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG</b>										
	<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran ()</b>	<b>100%</b>							
		Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000, Materai 3000 dan Pengiriman Surat yang dilakukan	150 lembar materai 6000, 150 lembar materai 3000 dan 12 bulan pengiriman surat	150 lembar materai 6000, 150 lembar materai 3000 dan 12 bulan pengiriman surat	250 lembar materai, 5 buku cek dan pengiriman surat	250 lembar materai, 4 buku cek dan pengiriman surat	100%	150 lembar materai 6000, 150 lembar materai 3000 dan 12 bulan pengiriman surat	150 lembar materai 6000, 150 lembar materai 3000 dan 12 bulan pengiriman surat	100%

		02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telephone yang Dibayarkan	1 rekening telepon	2 Rekening Telephone, 3 Rekening Listrik	1 rekening telepon	1 rekening telepon	100%	1 rekening telepon	1 rekening telepon	100%	
		03	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara	4 unit kendaraan roda empat 7 unit kendaraan roda dua	4 unit kendaraan roda empat 7 unit kendaraan roda dua	4 unit kendaraan roda empat 7 unit kendaraan roda dua	4 unit kendaraan roda empat 7 unit kendaraan roda dua	100%	4 unit kendaraan roda empat 7 unit kendaraan roda dua	4 unit kendaraan roda empat 7 unit kendaraan roda dua	100%	
		04	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat-alat Kebersihan Kantor yang disediakan	20 Item	20 Item	20 Item	20 Item	100%	20 Item	20 Item	100%	
		05	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	19 Item	18 Item	18 Item	18 Item	100%	20 Item	20 Item	100%	
		06	Kegiatan Penyediaan Alat-alat tulis kantor	Alat-alat tulis kantor yang Disediakan	52 Item	50 Item	50 Item	50 Item	100%	50 item	50 item	100%	
		07	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Item	8 Item	8 Item, 1 Tahun	8 Item, 1 Tahun	100%	8 Item, 12 Bulan	8 Item, 12 Bulan	100%	
		08	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Item	11 Item	11 Item	11 Item	100%	17 item	17 item	100%	
		09	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
		10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Biaya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Diklat/Bimtek dan perjalanan tugas kedinasan lainnya yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
		11	Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jasa Non PNS dan Premi Asuransi yang Dibayarkan	0	3 Orang, 1 Tahun	3 Orang, 1 Tahun	3 Orang, 1 Tahun	100%	3 Orang, 1 Tahun	3 Orang, 1 Tahun	100%	

			1 2	Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tertibnya Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 tahun kegiatan pengadaan	1 tahun kegiatan pengadaan	100%	
			<b>0 2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>								
			0 0 1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional	0	1 Unit	0%	0%	0%	1 Unit Roda 4, 5 Unit Roda 2	1 Unit Roda 4, 5 Unit Roda 2	100%	
			0 0 2	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor	0	6 Item	1 Item	1 Item	100%	5 Item	5 Item	100%	
			0 0 3	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor	0	8 Item	5 Unit Mouse Optick, 5 Unit Keyboard	5 Unit Mouse Optick, 5 Unit Keyboard	100%	5 Item	5 Item	100%	
			0 0 4	Kegiatan Pengadaan Meubelair Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	0	0 unit	0%	0%	0%	0	0	0%	
			0 0 5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	0	0 unit	0%	0%	0%	0	0	0%	
			0 0 6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Dokumen Pengadaan Tanah	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	0	0	0%	
			0 0 7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Dokumen Pengadaan Tanah	0	0	0%	0%	0%	0	0	0%	
			<b>0 3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Penggunaan Atribut Pegawai</b>	<b>100%</b>								

		01	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Disiplin dalam Penggunaan Pakaian Dinas	40 Stel	0	0	0	0%	40 Stel	40 Stel	0%	
		06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Terpenuhinya Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>100%</b>							
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LKIP, LPPD, LKPJ	0	0	0	0	0%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
		02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan 2021	0	0	0	0	0%	2 Laporan	2 Laporan	100%	
		03	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Tersedianya DPA 2021, DPA Pergeseran 2021, RKA 2022, DPPA 2021, Renja 2021, Renja Perubahan 2021	0	0	0	0	0%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	
			<b>URUSAN KEPEGAWAIAN</b>										
		16	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Ratio Meningkatnya Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>95%</b>							
		001	Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS	Terpenuhinya Persyaratan untuk Pengangkatan sebagai PNS	112 Orang	0	74 Orang	73 Orang	99%	160 orang	160 orang	100%	
		002	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemko Bukittinggi	40 Orang	71 orang	75 Orang	98 Orang	131%	90 orang	90 orang	100%	

			0 0 3	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	0	0	50 Orang	0	0	0%	25 orang	25 orang	100%	
			0 0 4	Peningkatan Kompetensi Pegawai BKPSDM Kota Bukittinggi	Terpenuhinya Persyaratan untuk Pengangkatan sebagai PNS	0	0	0	0	0%	5 Orang	5 Orang	0%	
			0 0 5	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dalam membangun Profesionalitas	Terpenuhinya Syarat untuk Kepangkatan PNS	0	37 Orang	0	0	0%	43 orang	43 orang	100%	
			<b>1 7</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>95%</b>							
			0 0 1	Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu	Terpenuhinya Formasi Jabatan Fungsional	15 Orang	22 Orang	10 Orang	22 Orang	220%	15 orang	15 orang	100%	
			0 0 2	Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak lanjut	Terlaksananya Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut	5 Paket Rekomendasi	9 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 2 Rekomendasi Pangkat Pilihan	6 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 2 Rekomendasi Pangkat Pilihan	9 Rekomendasi Dalam Jabatan Struktural, 2 Rekomendasi Pangkat Pilihan	150%	8 paket rekomendasi	8 paket rekomendasi	100%	
			0 0 3	Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama	Jabatan Tinggi Pratama yang Diseleksi dan yang Dievaluasi	3 Paket Rekomendasi	24 Org Eselon II yang Dievaluasi	1 Org Eselon II/a & 6 Org Eselon II/b yg Diseleksi, 24 Org Eselon II yang Dievaluasi	24 Org Eselon II yang Dievaluasi	60,00 %	1 Eselon II/a, 6 Eselon II/b, 24 Eselon II/b	1 Eselon II/a, 6 Eselon II/b, 24 Eselon II/b	100%	

		004	Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara	Terpetakannya Potensi ASN	100 ASN	0	0	0	0%	175 ASN	175 ASN	100%	Tahun sebelumnya Penelusuran Potensi Bakat, Minat dan Kompetensi Kerja Aparatur Sipil Negara
		005	Penyusunan Formasi ASN	Terpenuhiya Formasi ASN Kota Bukittinggi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
		006	Pengadaan dan Pengurusan NIP ASN	Pengadaan, Pemberkasan dan Pengurusan ASN CPNS	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	
		007	Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	Terlaksananya Sumpah Janji PNS	150 Orang	0	0	0	0%	100 orang	100 orang	100%	
		008	Fasilitasi Pindah/Masuk ASN	Terlaksananya Fasilitasi PNS Pindah/Masuk	0	49 Orang	50 Orang	49 Orang	98%	50 orang	50 orang	100%	
		009	Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	Terlaksananya Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	12 Laporan	8 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	57%	9 laporan	9 laporan	100%	
		010	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	12 Paket Rekomendasi	10 paket rekomendasi	12 Paket Rekomendasi	15 Paket Rekomendasi	125%	10 rekomendasi	10 rekomendasi	100%	2017 Keg. Sidang MPP
		011	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling	Terlaksananya Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Surat Keputusan Izin Melaksanakan Proses Perceraian dan atau Ishlah	25 Kali Konseling	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	25 rekomendasi	25 rekomendasi	100%	

		011	Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP	Terlaksananya Penyusunan SKP	2600 Dokumen	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2600 Dokumen	2600 Dokumen	100%	
		012	Pengangkatan/Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Proses Pengangkatan/Penerimaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja	0	0	0	0	0%	1 laporan	1 laporan	100%	
		18	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>Jumlah Aparatur yang Difasilitasi mengikuti Pendidikan Kedinasan</b>	<b>550 orang</b>								
		001	Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II dan Pim Tk.III	Terpenuhinya Syarat PNS dalam Menduduki Jabatan Struktural	0	5 Orang Pim Tk. III	5 Orang Pim Tk. III	5 Orang Pim Tk. III	100%	0	0	0%	Penggabungan Kegiatan
		002	Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.II, Pim Tk.III dan Pim Tk. IV	Terpenuhinya Syarat PNS dalam Menduduki Jabatan Struktural	1 Orang Pim Tk. II, 5 Orang Pim Tk. III, 15 Orang Pim Tk. IV	0	0	0	0%	2 Orang Pim Tk. II, 7 Orang Pim Tk. III, 30 Pim Tk. IV	2 Orang Pim Tk. II, 7 Orang Pim Tk. III, 30 Pim Tk. IV	100%	Penggabungan Kegiatan
		003	Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis	Terpenuhinya Kompetensi ASN Pemko Bukittinggi sesuai Kebutuhan	100 Orang	236 Orang	300 Orang	515 Orang	172%	350 orang	350 orang	100%	
		004	Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk.IV	Terpenuhinya Syarat PNS dalam Menduduki Jabatan Struktural	0	30 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	0	0	0%	Penggabungan Kegiatan
		005	Seleksi Calon Taruna STTD Tingkat Kota Bukittinggi	Terpenuhinya Formasi untuk Dinas Perhubungan	0	5 Orang	0	0	0%	0	0	0%	Implementasi SAKIP, Kegiatan ditiadakan.



		1 9	<b>Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi</b>	<b>7 kegiatan</b>								
		0 0 1	Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja	Terlaksananya Proses Administrasi Kenaikan Pangkat, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja	500 SK, 5 SK dan 20 SK	541 SK Kenaikan Pangkat, 4 SK Penyesuaian Masa Kerja, 15 SK Pemakaian Gelar	500 SK, 5 SK, 20 SK	420 SK Kenaikan Pangkat, 12 SK Pemakaian Gelar	82,29 %	500 SK, 5 SK dan 20 SK	500 SK, 5 SK dan 20 SK	100%	
		0 0 2	Fasilitasi Pengurusan KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG	Tersedianya Kartu Identitas Pegawai	0	73 Buah	100 Bh	47 Bh	47%	75 dokumen	75 dokumen	100%	
		0 0 3	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG	Up date dan Up grade Modul Aplikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
		0 0 4	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Up date Data SAPK On-line ke BKN Pusat dan Jasa Internet	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
		0 0 5	Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun	Terlaksananya Pengurusan Pensiun PNS	120 Orang	161 Orang	130 Orang	115 Orang	88%	120 orang	120 orang	100%	
		0 0 6	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Arsip Kepegawaian yang Terkelola	0	300 Arsip	0	0	0%	0	0	0%	
		0 0 7	Pengelolaan Absensi Terintegrasi	Terintegrasinya Absensi SKPD dengan BKPSDM Kota Bukittinggi	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	0	100%	
		0 0 8	Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Rekomendasi Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	1 Rekomendasi	0	0	0	0%	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%	

		0	Pengukuran Indeks Profesional Aparatur	Rekomendasi Indeks Profesional Aparatur	1 Rekomendasi	0	0	0	0%	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%	
		0	Pengukuran Indeks Merit System	Rekomendasi Indeks Merit System	1 Rekomendasi	0	0	0	0%	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%	
		0											
		<b>21</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur</b>	<b>Jumlah Pegawai yang menerima Reward</b>	<b>850 Orang</b>								
		0	Penilaian Pegawai/ASN Berprestasi	Pegawai yang Menerima Penghargaan	0	0	0	0	0%	20 orang	20 orang	100%	Terakhir dilaksanakan pada Tahun 2017
		0	Pengurusan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah Berkas Administrasi dan Pengurusan Berkas Penghargaan SLKS	0	454 Dokumen	300 Dokumen	323 Dokumen	108%	300 piagam	300 piagam	100%	
		0	Pembekalan kewirausahaan bagi ASN	Terlaksananya Pembekalan Kewirausahaan	0	0	0	0	100%	40 Orang	40 Orang	100%	
		0	Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan bagi Tenaga Non PNS	Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Honorer/PHL yang diberikan	0	791 Orang	757 Orang	757 Orang	100%	0	0	100%	Diserahkan ke masing-masing SKPD
		0	Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS	PNS yang melaksanakan Pembekalan Purna Tugas	57 Orang	60 Orang	58 Orang	58 Orang	100%	70 orang	70 orang	100%	
		0	Pemulangan Jenazah	Fasilitasi Pemulangan Jenazah ASN	1 Jenazah	1 Kegiatan	0	0	0%	1 Jenazah	1 Jenazah	100%	
		0	Evaluasi dan Implementasi TPP PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	Tersedianya Laporan Evaluasi dan Implementasi TPP PNS	0	0	0	0	0%	2 Laporan	2 Laporan	100%	

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dengan telah dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, dapat dilihat bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi baik yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik serta telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil Daerah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta segenap perangkat aparatur dan juga dalam penguasaan dibidang tugas masing-masing pegawai.

Analisis terhadap kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai tugas dan fungsi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 561.217.250,- guna mendukung 12 (dua belas) kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor,
6. Penyediaan alat tulis kantor,
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
9. Penyediaan makanan dan minuman,

10. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi,
11. Penyediaan jasa pegawai non PNS,
12. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Secara umum kegiatan yang terdapat pada program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan, adapun serapan anggaran hingga akhir tahun atau triwulan IV mencapai 87,81% atau sebesar Rp. 492.802.673,- sesuai dengan realisasi kebutuhan disamping adanya efisiensi.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini juga merupakan upaya mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dengan meningkatkan sarana dan prasarana aparatur, alokasi dana sebesar Rp. 122.900.000,- guna mendukung 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- a) Pengadaan Peralatan Kantor, peralatan kantor yang diadakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, berupa : 5 (lima) unit Mouse Optick dan 5 (lima) unit Keyboard,
- b) Pengadaan Perlengkapan Kantor, perlengkapan kantor yang diadakan guna mendukung kelancaran tugas kedinasan sesuai dengan kebutuhan, berupa 1(satu) paket Vertical Blind,
- c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, berupa Rehab ruangan kerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Dilihat dari capaian kinerja, kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan dan target dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang lebih baik dan representative,

Serapan anggaran pada program ini 95,55% atau sebesar Rp.117.424.880,- sesuai realisasi pengadaan atau belanja.

### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam rangka meningkatkan SDM Aparatur yang memenuhi standar kompetensi. Dari alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.071.704.000,- sampai akhir tahun 2019 ini dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.050.247.400,- atau 98,00%.

Program ini memiliki 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a) Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS,
- b) Pada Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar,

Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS bagi Golongan II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, bekerjasama dengan PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi – Baso dengan target 74 (tujuh puluh empat) orang yang terdiri dari 11 Orang Golongan II bertempat di Hotel Dymen's Bukittinggi dan 63 orang Golongan III bertempat di Kampus PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi – Baso. Capaian realisasi keuangan kegiatan ini 99,55 % dari pagu anggaran Rp. 790.704.000,- Namun dalam pelaksanaannya capaian kinerja 98,65% karena hanya diikuti sebanyak 73 orang dan 1 orang CPNS Golongan III tidak dapat mengikuti Diklat Prajabatan tersebut karena melahirkan.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar dari dana yang telah disediakan sebesar Rp. 281.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 263.078.350,- atau 93,62% capaian kinerja 130,67%, bantuan pendidikan terealisasi sebanyak 98 orang dari target 75 orang.

### **4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

Program dengan alokasi dana sebesar Rp. 986.799.200,- hingga akhir tahun 2019 telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 637.212.149,- atau 64,57%, yang digunakan untuk melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan, yaitu : Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu, Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut, Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi

Pratama, Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara, Penyusunan Formasi PNS, Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS, Fasilitasi Pindah/Masuk ASN, Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN, Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN, Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling dan Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP.

Dilihat dari capaian kinerja, secara umum kegiatan pada program ini telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, namun belum seluruhnya dapat memenuhi target yang ditetapkan,

Kegiatan Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu, capaian kinerja melebihi target dengan pencapaian 360 % berupa penerbitan 54 orang/SK jabatan fungsional dari target 15 orang,

Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak Lanjut, capaian kinerja 300% berupa penerbitan 13 Rekomendasi untk PNS dalam Jabatan Struktural dan 2 Rekomendasi Kenaikan Pangkat Pilihan dari target 4 dan 2 rekomendasi,

Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama, capaian kinerja 166,67% berupa 5 Rekomendasi di atas target yang ditetapkan sebanyak 3 Rekomendasi.

Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara, kegiatan ini berupa psikotes atau uji kompetensi bagi PNS yang pindah masuk ke lingkungan Pemko Bukittinggi, yang akan mengikuti Tugas Belajar dan yang akan dipromosikan, secara capaian kinerja telah terlaksana 138 orang dari target 100 orang,

Penyusunan Formasi CPNS, capaian kinerja 100% dengan telah selesainya kegiatan berupa dokumen formasi CPNS Kota Bukittinggi,

Pengadaan dan Pengurusan NIP CPNS, capaian kinerja 100% dengan telah dilaksanakannya proses pendaftaran secara online melalui akun <https://sscn.bkn.go.id>, adapun serapan anggaran hanya sebesar 37,38% dikarenakan untuk tahun ini sesuai jadwal hanya untuk pendaftaran sedangkan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) akan dilaksanakakn pada bulan Februari 2020, sehingga dana yang

disediakan BKPSDM Kota Bukittinggi tidak seluruhnya dapat dicairkan,

Fasilitasi Pindah/Masuk ASN, dari target 50 orang yang difasilitasi untuk pindah/masuk ke Pemko Bukittinggi, dapat terealisasi 100%,

Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN, untuk pelaksanaan sidak sesuai dengan instruksi dari pimpinan sehingga pada tahun 2019 ini hanya 4 kali dilakukan sidak / 4 laporan dengan capaian 57,14%,

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN, dari target 12 Paket Rekomendasi atau Alternatif Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin melalui Sidang MPP, telah terealisasi sebanyak 15 Paket rekomendasi dengan capaian kinerja 125 %,

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling, capaian kinerja 100%, dengan tersusunnya laporan Rekomendasi Psikologis Kasus Kepegawaian, Surat Keterangan telah mengikuti Konseling Pra Nikah dan Kasus Perceraian,

Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP, capaian kinerja 100% dari target 2658 dokumen SKP PNS telah dievaluasi dan dikirim ke BKN Regional XII sebanyak 2623 orang, kekurangan adanya yang tidak membuat SKP karena Cuti Sakit, CPNS, CLTA dan ada PNS yang APS, Meninggal dunia dan MPP.

## **5. Program Pendidikan Kedinasan**

Program Pendidikan Kedinasan dengan indikator : Jumlah Aparatur yang difasilitasi mengikuti Pendidikan Kedinasan. Dalam program ini ASN Kota Bukittinggi diberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan Kedinasan terutama Diklat Struktural, Diklat Teknis/Tertentu dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya. Alokasi dana yang disediakan pada program ini adalah sebesar Rp.958.694.700,- guna mendukung pelaksanaan kegiatan berikut :

- 1) Pengiriman PNS mengikuti Diklat Pim Tk. II, Pim Tk.III,
- 2) Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis,
- 3) Pelaksanaan Diklat Pim Tk.IV,

Secara umum kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan, demikian juga dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.905.356.914,- atau 94,44%, sudah cukup baik,

Capaian kinerja pengiriman peserta Diklat Pim Tk. III sebesar 100% yaitu terlaksana sebanyak 5 orang peserta, demikian juga dengan capaian kinerja pengiriman peserta Diklat Pim Tk. IV mencapai 100% dengan pengiriman 20 orang peserta Diklat Pim Tk. IV.

Adapun kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis, dari target 200 orang hingga akhir tahun 2019 telah terealisasi sebanyak 219 orang ASN Pemko Bukittinggi mengikuti diklat/bimtek atau pengembangan kompetensi, capaian kinerja sebesar 109,50%.

#### **6. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian**

Program ini dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, yang didukung dengan dana sebesar Rp. 753.297.050,- untuk melaksanakan 6 (Enam) kegiatan, yaitu :

- 1) Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja,
- 2) Fasilitasi Pengurusan KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG,
- 3) Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG,
- 4) Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK),
- 5) Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun,
- 6) Pengelolaan Absensi Terintegrasi,

Capaian kinerja pada program ini secara umum sudah cukup baik, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu :

- a) Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, telah diterbitkan 420 SK Knaikan Pangkat dari target 500 SK, 12 SK Pemakaian Gelar dari target 5 SK dan target 20 SK Penyesuaian masa kerja untuk tahun ini tidak teralisasi, sehingga capaian kinerja keseluruhan adalah 82,29%,



- b) Fasilitasi Pengurusan KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG dengan target 150 buah, capaian kinerja hanya 47,00% berupa 47 berkas kartu identitas pegawai, baik itu KARIS/KARSU maupun KARPEG yang telah diterbitkan,
- c) Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG, capaian kinerja 100% dengan adanya pengembangan dan perbaikan modul yang di update sesuai dengan perkembangan data terbaru,
- d) Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), capaian kinerja 100% berupa update data yang terkoneksi dengan BKN sekaligus pembayaran Jasa Langganan Jaringan Internet selama 12 bulan,
- e) Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun, capaian kinerja 88,46% dengan telah direalisasikannya penerbitan 115 SK Pensiun dari target 130 orang/SK Pensiun,
- f) Pengelolaan Absen Terintegrasi, capaian kinerja 100% dengan telah tersedianya peralatan guna mendukung terintegrasinya absensi SKPD dengan BKPSDM Kota Bukittinggi,

Serapan anggaran program ini sebesar 83,99% sesuai dengan realisasi kegiatan dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan,

#### **7. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur**

Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur dalam rangka meningkatkan prestasi dan kinerja aparatur. Program ini dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.373.915.245,- guna melaksanakan 3 (tiga) kegiatan,

- 1) Pengurusan Satya Lencana Karya Satya, telah dilaksanakan pengiriman berkas sebanyak 323 orang PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang terdiri dari penghargaan dengan masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun, sehingga capaian kinerja 107,6%,
- 2) Kegiatan Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan bagi Tenaga Non PNS, telah dilaksanakan pembayaran tunjangan kesejahteraan

bagi tenaga non PNS atau tenaga honorer dilingkungan pemerintah Kota Bukittinggi sebanyak 757 orang, capaian kinerja 100%,

- 3) Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS, capaian kinerja 105,45% dimana pada tahun 2019 telah dilaksanakan pembekalan sebanyak 58 orang PNS yang akan memasuki masa purna tugas,

Dari pagu yang disediakan, realisasi anggaran program ini sebesar 96,14%, dapat dikatakan sudah baik, namun masih tersisa dana sebesar Rp.53.041.801,- yang terbesar berasal dari belanja Perjalanan dinas luar daerah dan biaya kontribusi peserta kegiatan Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Peran dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi bila dikait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yaitu terdapat pada misi ke-2, yaitu ***Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan.***

Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan melalui tujuan : *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik* dan Sasaran Strategis : *Terlaksanya Reformasi Birokrasi.*

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip Good Governance dan Clean Government dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan harus didukung dengan adanya Kelembagaan Pemerintahan Daerah, Sumber Daya Aparatur dan Sarana dan Prasarana Pemerintahan serta Pengelolaan Keuangan.

Terkait Sumber Daya Aparatur, terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil membawa implikasi perubahan paradigma kepegawaian. Sehingga tantangan kedepan adalah pembangunan aparatur pemerintah yang mampu menghasilkan ketersediaan aparatur yang secara kuantitas sesuai dengan kebutuhan

organisasi dan secara kualitas memiliki kompetensi dan moralitas.

Selain itu tuntutan pelayanan dan kinerja pegawai semakin meningkat terkait dengan peran pemerintah sebagai fasilitator, motivator dan inovator dalam hubungan kerjasama antar negara sementara dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan aparatur yang kapabel, inovatif, berkinerja dan profesional.

Untuk pencapaian misi 2 tersebut, strategi yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021, yaitu :

1. Penguatan Kebijakan dan Implementasi Sistem Pengembangan Karir ASN secara Transparansi dan Berbasis Kompetensi,
2. Peningkatan Pelaksanaan Manajemen ASN.

Dari strategi tersebut maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Kompetensi Aparatur,
2. Mengevaluasi dan Menganalisa Jabatan dan Beban Kerja,
3. Menerapkan Sistem Reward dan Punishment yang Adil.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang representatif yang dimiliki oleh BKPSDM Kota Bukittinggi dalam memberikan pelayanan yang optimal.
2. Penempatan dalam jabatan belum sesuai dengan standar kompetensi.
3. Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur.
4. Belum terpenuhinya jumlah formasi kebutuhan ASN sesuai dengan Anjab dan ABK,
5. Belum optimalnya pendistribusian SDM Aparatur.

6. Belum optimalnya manajemen administrasi kepegawaian.
7. Masih rendahnya kinerja dan kesejahteraan aparatur.
8. Perlu adanya peningkatan dan pengawasan disiplin aparatur.

Dalam rangka pencapaian misi ke-2 tersebut di atas, jika Aparatur memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi maka akan dapat mewujudkan Aparatur yang kompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya, dengan demikian Aparatur yang profesional akan dapat diwujudkan.

Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dalam upaya mewujudkan profesionalitas aparatur adalah :

- ✓ Program Pendidikan Kedinasan,
- ✓ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
- ✓ Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur,
- ✓ Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian, dan
- ✓ Peningkatan Kesejahteraan Aparatur.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Mengingat pada Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD Kota Bukittinggi dan Renstra BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, maka penyusunan atau analisis terhadap kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 mengalami perbedaan prakiraan dari rancangan awal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra BKPSDM Kota Bukittinggi tahun 2016-2021.

Perubahan yang terjadi secara umum terkait kebutuhan pendanaan guna mendukung pelaksanaan manajemen ASN sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga program dan kegiatan diarahkan dalam upaya peningkatan kualitas dan kompetensi

Aparatur Sipil Negara serta layanan administrasi kepegawaian. Perubahan berupa peningkatan kebutuhan pada rincian belanja kegiatan setelah disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku dan target atau keluaran yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu pada kegiatan :

1. Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS, mengingat kegiatan ini merupakan salah satu syarat untuk Pengangkatan sebagai PNS, untuk itu perlu kiranya dianggarkan dana dengan target peserta 160 orang CPNS dan kebutuhan dana Rp. 1.816.000.000,-,
2. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah, mengingat kebutuhan ASN untuk penyesuaian Ijazah, perlu kiranya diakomodir kegiatan ini dengan pagu Rp. 25.000.000,-,

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yaitu pada kegiatan :

1. Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak lanjut, kegiatan ini selain untuk proses pelaksanaan mutasi dan promosi juga untuk pengelolaan pindah masuk dan pindah keluar dari dan ke Pemerintah Kota Bukittinggi sehingga pagu yang dibutuhkan sebesar Rp. 74.261.000,-,
2. Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama, direncanakan akan dilaksanakan kembali evaluasi dan seleksi terhadap jabatan pimpinan tinggi mengingat beberapa formasi mengalami kekosongan dengan adanya PNS yang pensiun dan juga evaluasi terhadap jabatan yang telah dilaksanakan, kebutuhan pagu sebesar Rp. 293.639.000,-,

Program Pelayanan Administras Kepegawaian, yaitu pada kegiatan :

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), merupakan penggabungan kegiatan SAPK dan SIMPEG dimana dalam kegiatan tersebut terdapat pembayaran langganan jasa jaringan internet dan belanja jasa upah kerja serta premi asuransi bagi tenaga Non PNS yang dibayarkan dengan demikian kebutuhan dana sebesar Rp. 127.679.962,-.

Kegiatan Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim. Tk. II, Tk.III dan Diklat Pim Tk. IV, terdapat biaya kontribusi yang harus dibayarkan kepada penyelenggara dengan standar yang telah ditentukan, untuk peserta Pim Tk. II akan dikirim sebanyak 1 Orang, Pim Tk. III sebanyak 5 orang dan Pim Tk. IV sebanyak 30 orang, penambahan peserta yang mengikuti diklat tentunya akan membutuhkan tambahan anggaran kegiatan.

Sedangkan untuk pengembangan karier atau kompetensi Aparatur Sipil Negara diupayakan melalui Kegiatan Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis. Penambahan anggaran dari tahun sebelumnya guna mengakomodir kebutuhan Aparatur Sipil Negara dalam mengikuti Diklat teknis/khusus atau sejenisnya dan penyelenggaraan diklat yang diarahkan pimpinan baik oleh BKPSDM sendiri maupun dari SKPD terkait.

Berikut adalah review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Rencana Kerja Tahun 2021

Rencana Kerja Tahun 2021



Rencana Kerja Tahun 2021

Rencana Kerja Tahun 2021

Rencana Kerja Tahun 2021

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian terkait dengan manajemen kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya aparatur sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian visi dan misi SKPD dan Kepala Daerah tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat baik melalui musyawarah tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota, karena

**Tabel 2-5.**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020  
Kota Bukittinggi**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tidak melaksanakan usulan program/kegiatan dari Masyarakat, karena sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi melaksanakan pengembangan dan pembinaan terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.



## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2020, isu strategis bidang aparatur adalah :

- 1). Pemerintahan yang bersih dan akuntabel,
- 2). Pemerintahan yang efektif dan efisien; dan
- 3). Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan isu strategis tersebut, maka sasaran utama pembangunan bidang aparatur yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel; yang ditandai dengan: meningkatnya integritas birokrasi; meningkatkan kapasitas dan independensi pengawasan, meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan dan meningkatnya transparansi proses pengadaan barang/jasa.
2. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi tepat fungsi dan tepat ukuran.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan makin efektifnya penguatan kelembagaan dan tata kelola pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik.

Arah kebijakan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam rangka melaksanakan pembangunan kepegawaian jangka menengah Tahun 2015-2020, adalah *“Meningkatkan Profesionalisme Pegawai”* selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang aparatur sebagaimana tertuang dalam RPJM Nasional 2015-2020.

Dengan demikian dalam rangka menyikapi sasaran pembangunan aparatur serta mendukung arah kebijakan pembangunan bidang aparatur maka arah kebijakan yang ditempuh oleh BKN adalah sebagai berikut :

1. Paradigma pegawai negeri sipil sebagai asset, bukan *expenses* dan

pelayanan masyarakat sebagai *return (value added to consumers)*;

2. Mengelola pegawai negeri sipil secara efisien dan efektif;
3. Membangun dan mengembangkan aliansi kerja sama dengan lembaga kepegawaian di setiap K/L dan daerah;
4. Penerapan pengendalian yang bersifat pencegahan (preventive) terhadap pegawai ASN dalam penegakan disiplin;
5. Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai ASN;
6. Mengoptimalkan dukungan dan manajemen internal kepegawaian BKN; dan
7. Pendataan pegawai ASN yang handal dan terkini;
8. Melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat;

Arah kebijakan BKN dan Kebijakan Nasional itulah yang menjadi dasar kebijakan BKD provinsi dan BKD/BKPSDM Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan melalui penyelenggaraan program/kegiatan guna pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta visi misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu sendiri.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi**

#### **a. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi terkait dengan visi dan misi Kota Bukittinggi adalah : Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Profesional;

#### **b. Sasaran**

Sedangkan sasaran yang akan dicapai terkait dengan tujuan tersebut di atas yaitu:

- 1) Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara;
- 2) Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara;

- 3) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi BKPSDM Kota Bukittinggi;

Adapun strategi dan kebijakan yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

**Strategi :**

1. Peningkatan Kompetensi ASN,
2. Peningkatan Pelaksanaan Manajemen ASN,
3. Peningkatan Tata Kelola Layanan Administrasi Kepegawaian,
4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian,
5. Peningkatan Kualitas Manajemen dan Pengelolaan Aset serta Sarana dan Prasarana Pendukung;

**Kebijakan :**

1. Penerapan Reward dan Punishment yang Objektif,
2. Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN,
3. Konsistensi Pelaksanaan SOP Pelayanan Administrasi Kepegawaian,
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Administrasi Perkantoran dan Sarana dan Prasarana,
5. Konsistensi Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Keuangan, Kinerja dan Aset SKPD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

Secara lengkap dan sistematis Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sebagai Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3-1.****Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dibidang Kepegawaian yang Profesioal	Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Profesional	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara	Peningkatan Kompetensi ASN	Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN
			Peningkatan Pelaksanaan Manajemen ASN	Penerapan Reward dan Punishment yang Objektif
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara	Peningkatan Tata Kelola Layanan Administrasi Kepegawaian	Konsistensi pelaksanaan SOP pelayanan administrasi kepegawaian
			Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Administrasi Perkantoran dan Sarana dan Prasarana
		Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi BKPSDM Kota Bukittinggi	Peningkatan kualitas manajemen dan pengelolaan aset serta sarana prasarana pendukung	Konsistensi pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan, perencanaan, kinerja dan aset SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan





## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **4.1. Rencana Kerja**

Keterkaitan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi adalah dalam pencapaian Misi ke-2 yaitu :

***“Meningkatkan Kinerja Pemerintah Secara Profesional, Transparan, Akuntabel dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan”***

Dengan demikian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan adalah dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut.

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2021 didasarkan pada Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang antara lain memuat tujuan dan sasaran dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi yaitu Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Profesional.

Adapun rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2021 sebagai berikut :

#### **4.1.1. Urusan**

Terkait dengan pembagian urusan pemerintahan, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi melaksanakan urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan disamping urusan fungsi penunjang urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas rutin kedinasan.

#### **4.1.2. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan serta upaya untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

**I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** dengan indikator Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan;

- 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik,
- 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor,
- 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,
- 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
- 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor,
- 7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
- 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
- 9 Penyediaan Makanan Dan Minuman,
- 10 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi Dan Perjalanan Dinas Keluar Kota Bukittinggi,
- 11 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS,
- 12 Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

**II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur,** Indikator Program yaitu : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri dari kegiatan;

- 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional,
- 2 Pengadaan Perlengkapan Kantor,
- 3 Pengadaan Peralatan Kantor,

**III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,** Indikatornya adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur Dalam Penggunaan Atribut Pegawai, dengan kegiatan;

- 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.

**IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan,** dengan indikator Terpenuhi Laporan Kinerja dan Keuangan, terdiri dari kegiatan :

- 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 3 Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD

**V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,** dengan indikator : Ratio Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari kegiatan :

1. Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar CPNS,
2. Pendidikan dan Pelatihan Formal/Beasiswa PNSD Kota Bukittinggi mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar
3. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
4. Peningkatan Kompetensi Pegawai BKPSDM Kota Bukittinggi
5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dalam membangun Profesionalitas

**VI. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur,** Indikator Program : % Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, kegiatan:

- 1 Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu
- 2 Pelaksanaan Proses Baperjakat dan Tindak lanjut
- 3 Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama
- 4 Pemetaan Potensi Aparatur Sipil Negara
- 5 Penyusunan Formasi ASN
- 6 Pengadaan dan Pengurusan NIP ASN
- 7 Pelaksanaan Sumpah Janji ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi
- 8 Fasilitasi Pindah/Masuk ASN
- 9 Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN
- 10 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN
- 11 Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Konseling
- 12 Evaluasi Lanjutan Penyusunan SKP
- 13 Pengangkatan/Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

**VII. Program Pendidikan Kedinasan,** indikator program adalah Jumlah Aparatur yang Difasilitasi mengikuti Pendidikan Kedinasan, dengan kegiatan :

- 1 Pengiriman PNS Mengikuti Diklat Pim Tk. II, Pim Tk. III dan Pim Tk. IV,
- 2 Pelaksanaan dan Mengikuti Diklat Khusus/Teknis

**VIII. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian,** Indikator Program : Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan Sistem Otomisasi, dengan kegiatan :

- 1 Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS, Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Masa Kerja,

- 2 Fasilitasi Pengurusan KPE, KARIS/KARSU dan KARPEG,
- 3 Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG,
- 4 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK),
- 5 Pengelolaan dan Pengurusan Pensiun,
- 6 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian,
- 7 Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur,
- 8 Pengukuran Indeks Merit System.

**IX. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur,** Indikator : Jumlah Aparatur yang menerima Reward, dengan kegiatan;

- 1 Penilaian Pegawai/ASN Berprestasi
- 2 Pengurusan Satya Lencana Karya Satya
- 3 Pembekalan Kewirausahaan bagi ASN
- 4 Pembekalan Persiapan Purna Tugas PNS
- 5 Pemulangan Jenazah
- 6 Evaluasi dan Implementasi TPP PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

Namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah perlu dilakukan penyesuaian serta pemetaan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dari hasil pemetaan tersebut maka telah disusun kembali Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan menjadi Rencana Kerja BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2021, yaitu :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** terdiri dari kegiatan;

**1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,** dengan sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah,

**2. Administrasi Keuangan**

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,

**3. Administrasi Umum**

- 1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
- 2). Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
- 3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,
- 4). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
- 5). Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,
- 6). Penyediaan Alat Tulis Kantor,
- 7). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,

- 8). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
- 9). Penyediaan Makanan dan Minuman,
- 10).Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah,

**4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,** dengan Sub Kegiatan :

- 1). Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas,
- 2). Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan,

**II. Program Kepegawaian Daerah,** program merupakan bagian dari Urusan Kepegawaian terdiri dari kegiatan;

**1. Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian,** adapun sub kegiatan ini adalah :

- 1) Pengolahan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional,
- 2) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian,

**2. Administrasi Kepegawaian,** adapun sub kegiatan ini adalah :

- 1) Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN,
- 2) Penataan dan Mutasi Jabatan,
- 3) Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai,
- 4) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.

**3. Peningkatan Kapasitas ASN,** adapun sub kegiatan ini adalah :

- 1) Peningkatan Kapasitas ASN,
- 2) Pengembangan Penilaian Kinerja ASN,
- 3) Pengembangan Assesment Center,
- 4) Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan Lembaga Profesi ASN Lainnya),
- 5) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.

**4. Pengembangan Karir ASN,** adapun sub kegiatan ini adalah :

- 1) Pengembangan Karir ASN,

**5. Pembinaan Disiplin ASN,** adapun sub kegiatan ini adalah :

- 1) Pembinaann Disiplin ASN,
- 2) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin,
- 3) Penegakan Disilin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan.

**III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia,** program merupakan bagian dari Urusan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari kegiatan;

**1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional,** adapun sub kegiatan ini adalah :

- 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

#### **4.1.3. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran kinerja pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi adalah seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### **4.2. Pendanaan**

Pendanaan keseluruhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi berasal dari APBD Kota Bukittinggi. Perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 7.797.266.824,- (*Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*).

Rencana program dan kegiatan BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel - 4.1.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021  
dan Prakiraan Maju Tahun 2022  
Kota Bukittinggi**

**Nama Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
								7.797.266.824				9.421.285.106
					<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>							
					<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			4.611.756.840				5.742.932.524
x	01	2	01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	BKPSDM		22.070.000				24.277.000
				01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	22.070.000			6 Dokumen	24.277.000
				02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan							0
				03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah							0
				04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah							0
				05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
x	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan</b>			4.284.143.715				4.716.558.087
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan bagi ASN BKPSDM Kota Bukittinggi yang dibayarkan.	1 Tahun	4.284.143.715			1 Tahun	4.712.558.087
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							0
				03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi							0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
				04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan							0
				05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							0
				06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKIP, LPPD, LKPJ yang disusun.	3 Dokumen				3 Dokumen	2.500.000
				07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan Keuangan 2021 yang disusun.	2 Laporan				2 Laporan	1.500.000
				08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran							0
				09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun							0
x	01	2	03		<b>Administrasi Umum</b>		<b>BKPSDM</b>	<b>285.138.125</b>				<b>938.651.938</b>
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000, Materai 3000 dan Pengiriman Surat yang dilakukan	100 lembar materai 6000, 50 lembar materai 3000 dan 12 bulan pengiriman surat	1.085.000			100 lembar materai 6000, 100 lembar materai 3000 dan 12 bulan pengiriman surat	1.193.500
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telephone yang Dibayarkan	1 rekening telepon	9.020.000			1 rekening telepon	9.922.000
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							0
				04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS							0
				05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah							0
				06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	4 unit kendaraan roda empat 7 unit kendaraan roda dua	96.830.000			4 unit kendaraan roda empat 7 unit kendaraan roda dua	106.513.000
				07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertibnya Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 tahun kegiatan pengadaan	0				0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat-alat Kebersihan Kantor yang disediakan	10 Item	1.640.000			12 Item	1.804.000
	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	10 Item	1.640.000			10 Item	1.804.000
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat-alat tulis kantor yang Disediakan	20 item	6.045.000			20 item	6.649.500
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Item, 12 Bulan	5.649.125			5 Item, 12 Bulan	6.214.038
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 item	825.000			10 item	907.500
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tertibnya Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 tahun kegiatan pengadaan	0			1 tahun kegiatan pengadaan	0
	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							0
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							0
	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							0
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Lembur, Rapat/Pertemuan dan Tamu yang Disediakan	12 bulan	9.350.000			12 bulan	10.285.000
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Biaya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Diklat/Bimtek dan perjalanan tugas kedinasan lainnya yang Disediakan	12 bulan	153.054.000			12 bulan	168.359.400
	19	Pengadaan Mobil Jabatan							0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
				20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan.		1 Unit Roda 4, 5 Unit Roda 2			1 Unit Roda 4, 5 Unit Roda 2	450.000.000
				21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas							0
				22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Kantor yang disediakan.		5 Item			50 Item	75.000.000
				23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas							0
				24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Kantor yang disediakan.		5 Item			15 Item	50.000.000
				25	Pengadaan Mebeleur						10 Item	50.000.000
				26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan							0
				27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas							0
				28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dipelihara.		1 unit			1 unit	0
				29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan							0
				30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional							0
				31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas							0
				32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor							0
				33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas							0
				34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor							0
				35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur							0
				36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan							0
				37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas							0
				38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor							0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
				39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan							0
				40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional							0
x	01	2	04		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>20.405.000</b>				<b>63.445.500</b>
				01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi						1 Unit	15.000.000
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Disiplin dalam Penggunaan Pakaian Dinas	40 Stel				40 Stel	26.000.000
				03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan							0
				04	Pengadaan Pakaian Korpri							0
				05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu							0
				06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun							0
				07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Fasilitasi Pemulangan Jenazah ASN	1 jenazah	14.985.000			1 jenazah	16.483.500
				08	Pemindahan Tugas PNS							0
				09	Pendidikan dan Pelatihan Formal							0
				10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Laporan Evaluasi dan Implementasi TPP PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang disusun.	2 laporan	5.420.000			2 laporan	5.962.000
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan							0
5	03				<b>URUSAN KEPEGAWAIAN</b>			<b>1.852.251.984</b>				<b>2.637.477.182</b>
5	03	02			<b>Program Kepegawaian Daerah</b>			<b>1.852.251.984</b>				<b>2.637.477.182</b>
5	03	02	01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian</b>			<b>159.039.522</b>				<b>174.943.474</b>
				01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN							0
				02	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	Formasi Jabatan Fungsional yang diisi.	5 orang	31.359.560				34.495.516

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
				03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Up date Data SAPK On-line ke BKN Pusat dan Jasa Internet dan Gaji Non PNS yang dibayarkan	12 bulan	127.679.962				140.447.958
				04	Pengelolaan Data Kepegawaian							
5	03	02	02		<b>Administrasi Kepegawaian</b>			<b>392.993.962</b>				<b>507.293.358</b>
				01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Formasi ASN Kota Bukittinggi yang disusun.	1 dokumen	25.355.000			1 dokumen	27.890.500
						Pengadaan, Pemberkasan dan Pengurusan ASN CPNS	1 kegiatan	152.434.250			1 kegiatan	167.677.675
						Proses Pengangkatan/Penerimaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja	1 laporan				1 laporan	75.000.000
						Jumlah ASN yang mengikuti Sumpah Janji PNS	100 orang	3.355.000			100 orang	3.690.500
				02	Pentaaan dan Mutasi Jabatan	Rekomendasi Proses Baperjakat, Tindak Lanjut dan Fasilitasi Pindah Tugas yang diterbitkan.	5 paket rekomendasi	74.261.000			5 paket rekomendasi	81.687.100
				03	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi dan Kepangkatan			0				0
				04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun			0				0
				05	Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai	SK Pensiun yang diterbitkan.	120 orang	43.465.000			120 orang	47.811.500
				06	Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian			0				0
				07	Pengelolaan Mutasi ASN							
				08	Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN							0
				09	Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat							0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
				10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	SK Kenaikan Kenaikan Pangkat, SK Pemakaian Gelar, SK Penyesuaian Masa Kerja yang diterbitkan.		400 SK, 1 SK dan 5 SK	94.123.712			400 SK, 1 SK dan 5 SK	103.536.083
5	03	02	03		Peningkatan Kapasitas ASN				632.280.000				770.508.000
				01	Peningkatan Kapasitas ASN	Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Pemko Bukittinggi sesuai Kebutuhan melalui Diklat Khusus/Teknis		100 orang	128.780.000			100 orang	141.658.000
						Pegawai BKPSDM yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi		5 orang				5 orang	0
						Pimpinan yang Memiliki Profesionalitas		43 orang				43 orang	0
						Peserta yang mengikuti Pembekalan Kewirausahaan		40 orang				40 orang	0
				02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Sasaran Kinerja Pegawai Individu pada SKPD dan Sekolah yang Dievaluasi		2600 Dokumen	10.815.000			2600 Dokumen	11.896.500
						Rekomendasi Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		1 rekomendasi				1 rekomendasi	15.000.000
						Rekomendasi Indeks Profesional Aparatur		1 rekomendasi				1 rekomendasi	25.000.000
						Rekomendasi Indeks Merit System		1 rekomendasi				1 rekomendasi	35.000.000
				03	Pengembangan Assessment Center	Laporan Potensi ASN yang disusun.		25 ASN	16.225.000			25 ASN	17.847.500
				04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan Lembaga Profesi ASN Lainnya)	Fasilitasi Kegiatan KORPRI.		1 Laporan	207.680.000				228.448.000
				05	Fasilitasi Profesi ASN				0				0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
				06	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			0				0
				07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Meningkatnya Kompetensi ASN Pemko Bukittinggi melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar	20 orang	252.710.000			20 orang	277.981.000
						Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kedinasan	20 orang	16.070.000			25 orang	17.677.000
				08	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat							0
				09	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional							0
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>Pengembangan Karir ASN</b>				<b>293.639.000</b>				<b>323.002.900</b>
				01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jabatan Tinggi Pratama yang Dievaluasi	24 Eselon II/b	293.639.000			24 Eselon II/b	323.002.900
				02	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir							0
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>Pembinaan Disiplin ASN</b>				<b>374.299.500</b>				<b>861.729.450</b>
				01	Pembinaan Disiplin ASN	Laporan Pengawasan Disiplin dan Pembinaan ASN	9 laporan	3.362.500			9 laporan	3.698.750
						Rekomendasi bimbingan konseling Pra Nikah dan Proses Bimbingan Konseling Kasus Perceraian dan Menerbitkan SK Izin Cerai dan atau Islah (Rujuk Kembali) yang diterbitkan,	20 rekomendasi	27.727.500			20 rekomendasi	30.500.250
				02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	Rekomendasi penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin yang diterbitkan.	10 rekomendasi	24.455.000			10 rekomendasi	26.900.500

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
				03	Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Pegawai yang Menerima Penghargaan	20 orang				20 orang	450.000.000
						Jumlah Berkas Administrasi dan Pengurusan Berkas Penghargaan SLKS	150 piagam	22.405.000			150 piagam	24.645.500
						PNS yang melaksanakan Pembekalan Purna Tugas	67 orang	296.349.500			67 orang	325.984.450
						Kartu Identitas Pegawai yang diterbitkan.	75 dokumen				75 dokumen	0
5	04				Urusan Pendidikan dan Pelatihan			1.333.258.000				1.040.875.400
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			1.333.258.000				1.040.875.400
5	04	02	01		Pengembangan Kompetensi Teknis			0				0
				01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							0
				02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
				03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							0
				04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							0
5	04	02	02		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>			1.333.258.000				1.040.875.400
				01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional							0
				02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi							0
				03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota							0
				04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar							0



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)
					05 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga								0
					06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional								0
					07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	CPNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar.		112 Orang Peserta Latsar CPNS	1.164.878.500			55 Orang Peserta Latsar CPNS	598.934.400
						PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural (Pim Tk. I, im Tk. III dan Pim Tk. IV).		1 Orang Pim Tk. II, 1 Orang Pim Tk. III, 3 Orang Pim Tk. IV	168.379.500			1 Orang Pim Tk. II, 2 Orang Pim Tk. III, 12 Orang Pim Tk. IV	441.941.000
					08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan								0



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2021 merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah dan tujuan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Disamping itu terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi diarahkan untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kota Bukittinggi Tahun 2021 kiranya dapat memberi manfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Sasaran Strategis, Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, Agustus 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BUKITTINGGI



**SYSTINNA, SE**  
NIP. 19660104 198602 2 003